

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Legal Protection for Children Born Out of Wedlock Under Act No. 1 1974 in The Special Region of Yogyakarta*

Endang Heriyani<sup>1</sup> dan Sudikno Mertokusumo<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

## ABSTRACT

This research is a normative legal research, which aims to investigate the implementation of legal protection for children born out of wedlock after the promulgation of act No. 1 of 1974 in the Special Region of Yogyakarta.

Data used in this research were secondary and primary data. The secondary data were obtained from library research conducted through a documentary study. The primary data were obtained from field research conducted through interviews and questionnaires.

The results of the research reveal that children born out of wedlock receive legal protection under the following:

1. Legal protection by legislation

Act No. 1 of 1974, Article 43 stipulates that a child born out of wedlock has a civil relationship with its mother and her family. In addition, according to Article 66 in Act No. 1 of 1974, the stipulation on legalization and recognition of children in the Civil Code can be enforced because Act No. 1 of 1974 does not provide for legislation and recognition of children.

2. Legal protection by the biological father

Legal protection for a child born out of wedlock is given by its biological father when he recognizes the child by marrying its mother. This recognition and legalization of the child can be stated in the parents' marriage certificate. Besides, the recognition and legalization can be stated in a court decision. With recognition and legalization, children born out of wedlock receive legal protection because the recognition is made voluntarily so that the father actually provides the child loving care and therefore fulfills his parental obligation.

1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

3. Legal protection by a judge's decision.

A child born out of wedlock can receive legal protection under a judge's decision, which declares that a person is the biological father of a child and requires him to provide for its living expenses and education. However, a judge's decision does not effectively give protection for a child born out of wedlock because in practice not all biological fathers carry out the decision.

*Keywords: Legal protection -- children born out of wedlock.*

## PENGANTAR

Manusia sejak dilahirkan selalu hidup bersama-sama dalam kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama (Sudikno Mertokusumo, 1986: 2).

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia itu dalam hidupnya membutuhkan kawan, baik sebagai pendamping maupun sebagai pelindung. Manusia selalu ingin dicintai, sehingga mempunyai naluri untuk membentuk suatu keluarga dan mengembangkan keturunan. Untuk membentuk suatu keluarga dan mengembangkan keturunan dapat ditempuh dengan perkawinan.

Hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah perkawinan, namun sampai sekarang masih dijumpai adanya orang yang melakukan hubungan di luar perkawinan. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan (Gatot Supramono, 1998: 72).

Pada umumnya dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan disambut dengan bahagia. Sebaliknya kehadiran anak luar kawin, sukar diterima, baik di kalangan keluarganya sendiri maupun dalam masyarakat.

Anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya disebut anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari ibu dan ayah yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak tidak sah atau anak luar kawin (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1990: 164).

Anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya sampai anak itu dewasa atau melangsungkan perkawinan walaupun belum dewasa. Kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anaknya berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian anak sah akan mendapat perlindungan hukum yang selayaknya bila kedua orang tuanya benar-benar menjalankan kewajibannya.

Anak luar kawin menurut KUHPdt perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 280 dan Pasal 282 ayat (2) KUHPdt. Pasal 280 KUHPdt menentukan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pasal 282 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang perempuan yang melakukan hubungan di luar perkawinan boleh melakukan pengakuan, walaupun belum mencapai umur 19 tahun. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu, kalau tidak mengakui maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak (Ali Afandi, 1986: 146).

Pada tahun 1947 di Belanda sudah ada perubahan, yaitu dalam Pasal 336 ayat (1) B.W.N. ditentukan bahwa sejak kelahirannya maka timbul hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya (Völlmar, 1989: 122). Perubahan seperti itu tidak diikuti dengan perubahan dalam KUHPdt kita (Satrio, 2000: 151). Dengan demikian pada saat ini, menurut hukum yang berlaku di negara Belanda seorang ibu tidak perlu melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang ibu juga tidak perlu mengakui anak luar kawin, karena menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat diketahui bahwa anak luar kawin dengan bapak biologisnya tidak mempunyai hubungan perdata, sehingga bapak biologis tidak mempunyai kewajiban apapun. Keadaan tersebut dirasakan tidak adil, karena adanya anak luar kawin tidak mungkin hanya akibat perbuatan seorang perempuan saja, tetapi merupakan akibat perbuatan seorang laki-laki dan perempuan. Pembentuk Undang-undang juga tidak memperhitungkan bagaimana kalau ibu anak luar kawin meninggal dunia terlebih dahulu, dan sama sekali tidak mempunyai keluarga.

Peraturan Pemerintah yang dijanjikan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akan mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin sampai kini belum juga dikeluarkan oleh Pemerintah.

Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, tetapi setelah ia lahir, berhak mendapat perlindungan hukum, sama tanpa beda (Bismar Siregar,

1986: 5).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta?.

## CARA PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau yang disebut penelitian kepustakaan. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara dan kuesioner.

Laporan hasil penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis, terperinci dan menyeluruh. *Analitis*, karena akan diuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum perlindungan terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di Daerah Istimewa Yogyakarta dijumpai adanya anak luar kawin, selain itu penulis berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga serta biaya.

Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim Pengadilan Negeri Wates, hakim Pengadilan Negeri Bantul, hakim Pengadilan Negeri Wonosari.
2. Pengacara, yaitu Zul Arman Aziz SH, Budi Widjayanto SH, Isdanu Sismiyananto SH, dan Suprpti, SH.
3. Pegawai dari Seksi Data dan Penyuluhan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo, Dinas

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu berdasarkan Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, ketentuan mengenai pengesahan anak luar kawin yang terdapat dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 279 KUHPdt dan pengakuan anak luar kawin dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPdt dapat diberlakukan.

Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dapat diperoleh dari bapak biologisnya, pada saat bapak biologisnya melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, yaitu pada saat bapak biologisnya melangsungkan perkawinan dengan ibunya.

Prosedur melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin melalui perkawinan adalah:

1. Memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil.
2. Mengisi formulir yang berisi mengenai pengakuan yang disediakan Kantor Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan lainnya, yaitu foto copy kutipan akta kelahiran anak luar kawin yang akan diakui, foto copy KTP orang yang akan mengakui, foto copy kartu keluarga (semua foto copy dilegalisir pemerintah setempat), surat pernyataan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan telah mempunyai anak, bagi warganegara Indonesia keturunan ditambah SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan Surat Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
3. Setelah dilangsungkan perkawinan di depan pemuka agama yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Selanjutnya pengakuan dan pengesahan anak dimuat dalam akta perkawinan. Dalam akta kelahiran anak luar kawin yang diakui dan disahkan tersebut dicatat mengenai perubahan data yang berupa pengakuan dan pengesahan yang dikenal dengan istilah 'catatan pinggir', karena catatan tentang perubahan data dicatat pada bagian pinggir dari akta kelahiran semula. Akta kelahiran yang telah ditambahi dengan catatan pinggir ini disimpan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan dalam kutipan akta kelahiran (yang

diberikan kepada yang bersangkutan), perubahan data yang berisi pengakuan dan pengesahan dicatat di sebaliknya, bukan di bagian pinggir kutipan akta kelahiran. Catatan pinggir tersebut kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan diberi cap Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin juga dimuat dalam penetapan pengadilan, apabila ayah biologisnya sebelum atau ketika melangsungkan perkawinan telah lalai mengakui anak luar kawinnya. Untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin, maka ayah biologis harus mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan kepada hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan kemudian dilanjutkan dengan pengesahan, maka anak luar kawin mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya, karena kedudukannya sama dengan anak sah. Akibatnya anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari ayah yang mengakuinya, berhak memakai nama bapaknya.

Pelaksanaan pengakuan anak yang telah dilakukan, baik yang dimuat dalam akta perkawinan maupun dalam penetapan pengadilan, merupakan pengakuan sukarela, karena dilakukan atas *inisiatif* dari bapak biologis anak luar kawin yang bersangkutan. Bagi anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan sukarela, anak luar kawin mendapatkan kasih sayang dari bapak biologisnya, hal ini terjadi karena bapak biologis benar-benar menyadari bahwa anak luar kawin adalah anaknya, sehingga sebelum pengakuan secara formal dilakukan, bapak biologis sudah mencurahkan kasih sayang dengan mengasuhnya, mendidik dan membiayai keperluan hidupnya.

Selain pengakuan sukarela, ada juga pengakuan terpaksa, yaitu pengakuan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang menetapkan bahwa seorang adalah bapak seorang anak luar kawin. Adanya pengakuan anak luar kawin yang dimuat dalam putusan hakim didahului oleh gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Jadi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dapat diperoleh dari putusan hakim yang menentukan bahwa seseorang adalah bapak biologis dari seorang anak luar kawin.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun dimulai dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1999 ternyata ditemukan 9 (sembilan) gugatan yang oleh penggugatnya dimaksudkan untuk

mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Kesembilan putusan pengadilan tersebut adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 April 1988 No. 18 / Pdt/G/1987/PN.WT., putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Nopember 1988 No. 95/Pdt/1988/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 1992 No. 1200 K/Pdt/1989.
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Juni 1989 No. 02/ Pdt/G/1989/PN.Wnsri.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Maret 1990 No. 47/ Pdt/G/1989/PN.Btl., Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 1990 No. 91/Pdt/1990/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 November 1992 No. 1046 K/Pdt/1991.
4. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Desember 1990 No. 30/Pdt/G/1990/ PN.Btl., Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 April 1990 No. 32/Pdt./1991/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 1995 No. 3194 K/Pdt/1991.
5. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 November 1991 No. 11/Pdt./G/1991/PN. Btl., Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Juni 1992 No. 45/Pdt/1992/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Mei 1995 No. 3603 K/Pdt/1992.
6. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 November 1993 No. 46/Pdt./G/1993/PN. Btl., Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 April 1994 No. 27/Pdt/1994/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1998 No. 1808 K/Pdt/1994.
7. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 1995 No. 60/Pdt/G/1995/PN. Yk., Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 April 1996 No. 126/Pdt/1995/PT.Y., Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1998 No. 2878 K/Pdt/ 1996.
8. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Desember 1997 No. 83/Pdt/G/1997/PN. Yk.
9. Akte Perdamaian tanggal 16 Maret 1999 No. 05/Pdt/G/1999/ PN.Wonosari.

Dari kesembilan perkara tersebut, semua penggugat mengalami kejadian dan kepentingan yang hampir sama. Pada mulanya penggugat (ibu dari anak luar kawin) melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan tergugat (bapak biologis anak luar kawin), kemudian penggugat hamil, selanjutnya melahirkan anak. Ternyata bapak biologis tidak mau mengakui anak luar kawinnya maupun melangsungkan perkawinan dengan si ibu, apalagi bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. Ibu anak luar kawin

merasakan bahwa anak luar kawinnya sama sekali tidak terlindungi haknya, sehingga mengajukan gugatan kepada pengadilan, setelah menempuh cara kekeluargaan tidak berhasil. Pada umumnya gugatan yang diajukan adalah agar hakim menetapkan bahwa anak luar kawin tertentu adalah anak biologis dari seorang pria tertentu dan agar si bapak biologis bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak luar kawinnya.

Dari kesembilan gugatan yang diajukan tidak semuanya dikabulkan oleh hakim. Putusan pengadilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan perdamaian

Melalui pelaksanaan isi perjanjian perdamaian anak luar kawin mendapatkan perlindungan hukum karena anak luar kawin diakui oleh bapak biologisnya, dan bapak biologis bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin hingga dewasa.

2. Putusan hakim yang menolak gugatan penggugat

Putusan hakim yang menolak gugatan seorang ibu anak luar kawin yang menuntut untuk kepentingan anak luar kawin, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Hal ini dapat terjadi, karena hakim berpikir formalistis, sempit, kurang cermat, serta tidak konsisten. Hakim yang hanya terpaku pada ketentuan Undang-undang menunjukkan hakim berpandangan '*system oriented*'. Pandangan ini titik tolaknya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan kepentingan yang sedang dihadapi oleh pencari keadilan.

3. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat

Putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, karena dalam putusan tersebut ditetapkan bapak biologis dari anak luar kawin, yang merupakan tuntutan yang paling mendasar demi kedudukan seorang anak luar kawin. Selain itu bapak biologis juga diputuskan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin sampai anak dewasa. Putusan ini memberi jaminan bagi kehidupan masa depan anak luar kawin.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ini dapat terwujud apabila hakim berpandangan '*problem oriented*', yaitu pandangan yang bertitik tolak pada masalah konkrit yang harus dipecahkan, bukan pada sistem perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo, 1996: 100). Pandangan tersebut dapat terlihat dari hakim yang mampu berpikir



dengan cermat, dapat bersikap adil dan yang paling penting apabila hakim mempunyai komitmen untuk melindungi seorang anak luar kawin, karena dari peraturan perundang-undangan belum cukup memberikan perlindungan, dari bapak biologisnya hanya ada harapan untuk mengakuinya. Dengan demikian suatu putusan hakim dapat dikatakan merupakan jalan terakhir seorang anak luar kawin dapat memperoleh perlindungan hukum, yang dapat menentukan masa depannya, karena dalam putusan hakim suatu pengakuan dari bapak biologisnya dapat dipaksakan.

Adanya pengakuan terpaksa, bahwa pengakuan yang didasarkan atas putusan hakim yang menetapkan bahwa seorang tertentu adalah ayah seorang anak luar kawin, dalam prakteknya kurang memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin. Hal ini karena dalam pengakuan terpaksa, tidak ada inisiatif dari bapak biologis untuk mengakui anak luar kawinnya, sehingga dalam praktek kehidupan sehari-hari si bapak tidak mau memberikan kasih sayang kepada anak luar kawinnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya. Kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari serangkaian perbuatan, antara lain seperti menimang, memberikan perawatan kesehatan ketika sakit, membujuk ketika 'rewel', memberikan perhatian ketika membutuhkan, ataupun bercanda dengan anaknya. Wujud kasih sayang tersebut dalam prakteknya tidak diterima oleh anak luar kawin. Bahkan ada bapak biologis yang tidak bersedia memenuhi kewajiban untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan bagi anaknya seperti yang tertera dalam putusan hakim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Anak luar kawin mendapat perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 43 yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974, ketentuan mengenai pengesahan dan pengakuan anak dalam KUHPdt dapat diberlakukan, karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengesahan dan pengakuan anak.

Selain itu anak luar kawin juga mendapat perlindungan hukum dari bapak biologisnya pada saat bapak biologisnya melakukan pengakuan

dan pengesahan anak luar kawin, yaitu pada saat bapak biologisnya melangsungkan perkawinan dengan ibu anak luar kawin. Jadi pengakuan dan pengesahan dimuat dalam akta perkawinan orang tuanya. Selain itu pengakuan dan pengesahan anak juga dapat dimuat dalam penetapan pengadilan.

Anak luar kawin juga memperoleh perlindungan hukum dari putusan hakim, yaitu dari putusan hakim yang menetapkan bahwa seseorang adalah bapak seorang anak luar kawin, dan yang menghukum bapak biologis untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak luar kawin. Namun adanya putusan hakim tersebut kurang memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, karena dalam prakteknya tidak semua bapak biologis melaksanakan apa yang diputus oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Supramono, Gatot, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.
- Völlmar, H.F.A., 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press.

## Daftar Peraturan:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.